

Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah



Oleh: Ratna Christianingrum & Adhi Prasetyo S. W.

Penerapan Otonomi Daerah

UU 32/2004 & UU 33/2004 memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi lokal & meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah

Dana Transfer ke Daerah Terus mengalami peningkatan



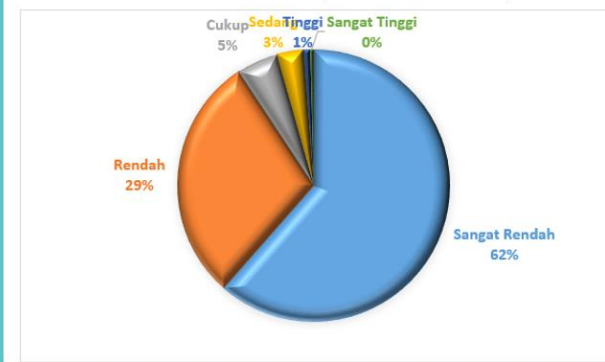
Peningkatan TKDD dapat mengindikasikan besarnya kepercayaan pemerintah kepada pemda untuk mandiri

Ketergantungan daerah terhadap TKDD sangat tinggi

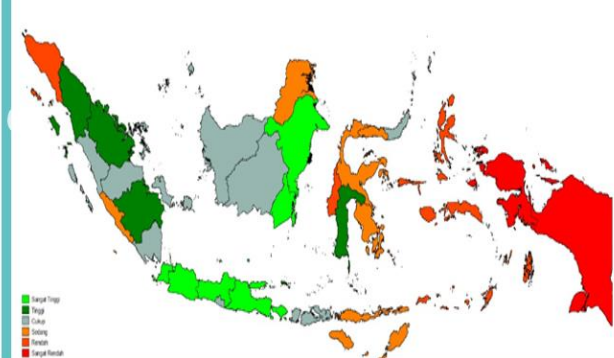
80,1% APBD di Indonesia bergantung pada TKDD
Kontribusi PAD hanya sebesar 12,87%

Status Desentralisasi Fiskal

Gambar 2. Status Desentralisasi Fiskal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota



Gambar 3. Status Kemandirian Fiskal Provinsi-Provinsi di Indonesia



Gambar 2 memperlihatkan bahwa lebih dari 90% Kab/Kota di Indonesia masih bergantung kepada pemerintah pusat untuk membiayai urusan daerah
Gambar 3 memperlihatkan bahwa hanya 8 provinsi yg memiliki kemandirian fiskal sangat tinggi, dimana sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan provinsi-provinsi di Papua memiliki kemandirian fiskal yang sangat rendah

Peta Kemampuan Keuangan Kab/ Kota (Metode Kuadran)

Growth (%)

KUADRAN II 66 kabupaten/ kota	KUADRAN I 52 kabupaten/kota
KUADRAN IV 245 kabupaten/Kota	KUADRAN III 146 kabupaten/Kota

Share (%)

Terdapat 52 kab/kota di kuadran I yang artinya memiliki PAD yang mengambil peran besar dalam APBD
Daerah tersebut memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal



Hampir 50% kab/kota di Indonesia belum memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi lokal daerah



Penyebab Ketergantungan Fiskal Daerah

Ketergantungan Fiskal Daerah

1 Kurangnya peran perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan	2 Tingginya derajat sentralisasi di bidang perpajakan. Pajak yang produktif, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat
3 hanya sedikit pajak daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan	4 Adanya keuletakan apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme
5 Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah kepada pemerintah daerah	

Peta Kemampuan Keuangan Provinsi (Metode Kuadran)



Hanya 6 provinsi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal



15 provinsi di Indonesia tidak memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi lokal



Penyebab Rendahnya Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

Adanya **pandemic COVID-19** dapat menjadi **momentum pemerintah** untuk melakukan **evaluasi kebutuhan SDM**, khususnya SDM di daerah

01

Masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah akan tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah

02

Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita

03

Kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada

Perbedaan Pembiayaan Kreatif

	Pinjaman Daerah	Obligasi Daerah	KPBU	PINA
Definisi	Semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.	Pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dalam bentuk pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek/kegiatan prasarana dan/atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat	Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko dengan IRR 6-12%.	Mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber dari anggaran non pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan IRR PINA > 13%.
Jenis/Kriteria	1. Pinjaman jangka pendek 2. Pinjaman jangka menengah 3. Pinjaman jangka panjang	1. General Bond 2. Revenue Bond 3. Double Barelled Bond	1. Dukungan sebagian konstruksi, 2. Pengembalian investasi melalui tarif dan VGF 3. Penjaminan pemerintah 4. Pengembalian investasi melalui Availability Payment	1. Mendukung pencapaian target prioritas 2. Memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi 3. Memiliki kelayakan komersial 4. Memenuhi kriteria kesiapan.
Sumber Pembiayaan	1. Pemerintah pusat 2. Lembaga Keuangan Bank 3. Lembaga Keuangan Bukan Bank 4. Pemda lain 5. Masyarakat	Masyarakat	Sebagian atau seluruhnya di biayai Badan Usaha	1. Penanaman modal 2. Dana kelolaan 3. Perbankan 4. Pasar Modal 5. Asuransi 6. Lembaga Pembiayaan 7. Lembaga Jasa Keuangan Lain; dan 8. Pembiayaan Lain yang Sah.
Syarat	1. Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang 2. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk 3. Tidak memiliki tunggakan kepada Pemerintah Pusat, 4. Mendapat persetujuan DPRD	1. Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang 2. Mendapat persetujuan DPRD setelah 3. Tidak melampaui akhir tahun anggaran pada masa	1. Kemitraan 2. Kemanfaatan 3. Bersaing 4. Pengendalian dan pengelolaan risiko 5. Efektif dan efisien.	1. Mendukung pencapaian target prioritas 2. Memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat 3. Memiliki kelayakan komersial 4. Memenuhi kriteria kesiapan.
Contoh Kegiatan	1. Pinjaman PEN DKI Jakarta 12,5T dan Jawa Barat 4T		1. Jalan Tol Manado-Bitung (Sebagian Kontruksi) 2. Proyek PLTU 2X1000 MW Jateng (Penjaminan Pemerintah) 3. Proyek SPAM Umbulan (Pengembalian Investasi melalui tarif dan VGF)	1. Waskita Toll Road: USD 10 miliar 2. PLTU Meulaboh 2x200 MW: USD 540 juta 3. Bandara Udara Kertajati: USD 2,2 miliar

Tantangan Pembiayaan Kreatif

Pinjaman Daerah



1. Ijin Prinsip DPRD
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5

Obligasi Daerah



1. Ijin DPRD
2. Kualitas SDM yang kurang memadai
3. Belum siapnya daerah untuk menerbitkan obligasi daerah
4. Belum adanya regulasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh akuntan publik
5. Tumpang tindih peraturan
6. Kondisi Politik
7. Perlunya transparansi daerah yang belum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah

KPBU



1. Banyaknya proyek KPBU yang bersifat "Politik"
2. Kurangnya pemahaman stakeholder
3. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
4. Regulasi dan fasilitas pendukung

PINA



Kepala Daerah



Rekomendasi

01

Efisiensi belanja pegawai

02

Penguatan BUMD

03

Meninjau regulasi yang tumpang tindih, memangkas regulasi, serta memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal pembiayaan kreatif

04

Peningkatan kapasitas SDM pegawai dan Kepala Daerah

05

Edukasi kepada masyarakat & Stakeholder